

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dapat memberikan pengaruh positif dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maka oleh karena itu manajemen yang baik sangat berperan penting dalam membangun dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat.

Menurut Schultz & Schultz (2006) lingkungan kerja merupakan suatu kondisi yang berkorelasi dengan karakteristik lingkungan bekerja terhadap karakter tiap pegawai yang mana hal itu berkaitan dengan timbulnya transformasi psikologis yang disebabkan dalam menjalankan pekerjaannya atau dalam keadaan tertentu yang harus terus diamati oleh organisasi yang mencakup berbagai hal seperti pekerjaan yang monoton, kebosanan dalam melakukan pekerjaan, dan kelelahan.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat tentu tidaklah dibangun dengan waktu yang singkat dan mudah, ada pertimbangan dan evaluasi yang dijalankan secara terus – menerus seiring waktu. Komunikasi dan motivasi memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang baik diperlukan pula komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yang efektif dapat mempermudah penyampaian pesan-pesan tertentu untuk memudahkan

anggota organisasi dalam mengerjakan pekerjaan. Komunikasi organisasi yang tidak efektif menimbulkan adanya penghambatan suatu pekerjaan dan menimbulkan resiko resiko yang mengakibatkan lambatnya pelayanan kepada masyarakat umum. Myers & Myers (1987) menegaskan bahwa komunikasi itu esensial dan merupakan inti dari spirit organisasi, tetapi sering kali organisasi menganggap komunikasi hanya sebagai salah satu dari ragam proses yang terjadi di dalam organisasi.

Dalam memperoleh peningkatan kepuasan kerja perlu memberikan motivasi kerja, sebab bila adanya pemberian motivasi kerja, dapat merubah psikologi para karyawan untuk menuju ke pemikiran yang positif.

Pemikiran positif inilah yang dapat meningkatkan pula kepuasan kerja yang berdampak dalam kinerja aparatur pemerintah daerah. Pemimpin yang baik lebih banyak mendengarkan pendapat para karyawannya, hal inilah yang bisa membuat komunikasi bisa lebih efektif dalam mengerjakan sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah dan karyawan pun akan memberikan loyalitas lebih untuk mengerjakan pekerjaannya dan berdampak pada kecepatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Meningkatkan motivasi kerja dengan cara memberikan bayaran yang sesuai dalam beban kerja dan keahlian, bagi beberapa karyawan penghasilan merupakan motivasi utamanya dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Bagi mereka itu akan memotivasi dirinya apabila mereka mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keahlian dan beban kerja yang

mereka peroleh berdampak pada kecepatan karyawan dalam mengerjakan pekerjaan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Jumlah Belanja	Anggaran	Realisasi
Modal	Rp. 476.900.428.379,00	Rp. 411.312.404.568,56

Sumber : LRA, Kabupaten Sleman 2018

Dilihat pada tabel 1.1, jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 yang memiliki anggaran sebesar Rp. 476.900.428.379,00 sedangkan realisasi tahun 2018 Rp. 411.312.404.568,56 yang mana memiliki selisih realisasi yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang diajukan, pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik (Ramadani *et. al.* ,2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu, Irfan *et al.* (2016) menyatakan bahwa penentuan sasaran pendapatan yang dicapai cenderung dianggarkan lebih rendah dari kemampuan maksimalnya. Sasaran anggaran yang mudah dicapai bisa ditinjau dari pencapaian realisasi anggaran, di mana tingkat realisasi lebih besar dari anggaran, sehingga akan menyebabkan persepsi bahwa kinerjanya semakin tinggi.

Sedangkan dalam belanja yang dicapai cenderung dianggarkan lebih banyak dari yang seharusnya. Sebab itu, realisasi belanja cenderung lebih

rendah penggunaannya dari anggaran yang sudah ditetapkan, yang mana peristiwa ini menandakan adanya senjangan anggaran dalam belanja.

Penjelasan mengenai partisipasi anggaran terdapat dalam surah An-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi sanksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh berlaku adil dan menjadi saksi-saksi atas kebenaran walaupun terhadap diri sendiri, ibu, bapak, karib kerabat, kaya atau miskin, karena keadilan dan kebenaran di atas segala-galanya. Penyusunan anggaran harus bersifat transparan, akuntabel, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berlaku adil untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya partisipasi anggaran ini diharapkan kinerja pemerintah dapat meningkat, karena anggaran digunakan untuk mengukur kinerja dalam suatu sistem pengendalian.

Laporan anggaran merupakan alat dalam membantu pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah sebagai alat ukur dalam penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah. Komunikasi organisasi

merupakan faktor pertama dalam kinerja aparatur pemerintah daerah. Dalam penelitian Ernita (2010) menjelaskan bahwa penyusunan laporan anggaran memerlukan komunikasi organisasi yang baik, dalam menyusun laporan anggaran, diperlukannya keterbukaan dan kejujuran satu sama lain. Apabila terjadi terlalu banyak hambatan dalam berkomunikasi dan tidak secepatnya dicari jalan keluarnya, maka akan menghambat kinerja dan menimbulkan perselisihan dalam menentukan pendapatan.

Komunikasi organisasi merupakan perilaku dalam organisasi yang terjadi dan bagaimana orang yang didalamnya dapat terlibat dalam prosesnya. Cara agar dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah dengan melakukan komunikasi organisasi yang baik, apabila dalam rapat terdapat masalah maka harus ada solusi dari masalah tersebut agar masalahnya tidak berlarut-larut yang akan mengakibatkan kinerja menjadi terganggu. Dengan terciptanya komunikasi organisasi yang efektif maka dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan terbuka sehingga akan terciptanya kreatifitas yang baik untuk para pegawai.

Gustin (2012) menunjukkan komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, Pada penelitian Afifi & Nugroho (2018) menyatakan bahwa komunikasi antar pegawai berpengaruh signifikan pada hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Komunikasi yang efektif antara tiap pegawai dengan atasan atau sebaliknya, sangat dibutuhkan dalam

menyamakan persepsi dalam penyusunan dan perumusan rencana kerja yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Pada penelitian Afifi & Nugroho (2018), komunikasi efektif antara atasan dengan pegawai ataupun sebaliknya dalam penyusunan maupun perumusan rencana kerja perlu dibangun untuk menyamakan persepsi. Sehingga komunikasi yang terjalin antara pegawai berpengaruh signifikan pada relasi partisipan penyusunan anggaran terutama dengan komunikasi manajerial sehingga sangat mudah untuk menjalankan rencana kerja yang ingin dicapai perusahaan.

Selain itu, partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor penentu pada kinerja aparatur pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu pendekatan yang bisa meningkatkan kinerja serta efektivitas organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran bisa dikatakan menjadi pendekatan manajerial dimana setiap anggota organisasi bisa untuk meningkatkan kinerjanya, sebab dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran maka setiap individu tersebut dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kinerja sesuai sasaran yang sudah ditetapkan. Partisipasi penyusunan anggaran lebih cenderung bagi bawahan dalam melakukan perundingan terhadap sasaran anggaran yang memiliki peluang supaya tercapai.

Penelitian Tapatfeto (2014) menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja aparatur

pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran pula memberi peluang terhadap bawahan dalam melakukan hubungan serta komunikasi terhadap atasannya. Jika partisipasi pada proses penyusunan anggaran menunjukkan nilai yang tinggi, maka kinerja aparatur pemerintah daerah yang akan dicapai pula semakin tinggi.

Dalam menjalankan struktural program kerja, diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran dimana setiap anggota individu yang terlibat berpengaruh terhadap penyusunan sasaran anggaran. Tujuannya untuk memberikan manfaat dapat mengurangi konflik antara setiap individu dalam organisasi serta meningkatkan kenyamanan dalam lingkungan.

Fungsi dari anggaran juga menjadi alat perencanaan untuk mengukur suatu indikator kinerja. Pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 134 ayat (3) tertulis “Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”. Dengan berlakunya undang undang yang sudah dijabarkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pendistribusian dana yang dimiliki secara efisien dan efektif, terutama pada pengembangan pelayanan untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Pasal 14 penyusunan rancangan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan rencana kerja akan digunakan untuk tahun berikutnya.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor lain dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas ini bisa mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas organisasi pada rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah akan terbantu dengan adanya kejelasan sasaran anggaran pada peningkatan kinerja yang diharapkan (Nofisa, 2014). Pada pengukuran kejelasan sasaran anggaran ada beberapa indikator yang mempengaruhi antara lain, tujuan, kinerja, koordinasi, standar, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, serta jangka waktu. Salah satu yang mengakibatkan tidak efektif serta efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang menyebabkan pegawai pemerintah kesulitan pada penyusunan sasaran anggaran (Darmawan, 2019).

Penelitian tentang kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Wianti dan Sisdyani (2016) mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran aturan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah pada SKPD di Kota Denpasar. Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Darmawan (2019) yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran di organisasi perangkat wilayah pada Kota Surabaya. Darmawan (2019) menjelaskan bahwa meningkatnya tingkat transparansi pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah. Selain itu, penelitian yang

dilakukan oleh Annisa *et. al.* (2020) mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Dalam mencapai tujuannya menggunakan *job relevant information* sebagai panduan memberikan kita wawasan dalam mengambil tindakan dan keputusan alternatif. Partisipan anggaran juga memberikan efek yang baik karena dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja, hal tersebut karena adanya transparansi dan keterlibatan partisipan dalam mengemukakan gagasannya sehingga mempengaruhi perasaan dan adanya penghargaan sebagai individu dalam organisasi.

Menurut Yusfaningrum & Ghozali (2005) meningkatkan kinerja manajerial dapat dilakukan dengan menggunakan *job relevant information* sebagai petunjuk, dengan hal itu mereka akan memperhatikan setiap pilihan dalam melakukan tindakan. López *et. al.* (2009) menegaskan *job relevant information* menciptakan kinerja yang lebih baik. Begitupula dalam penelitian yang dilakukan Ginting (2020) *job relevant information* memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap berbagai kinerja yang melibatkan manajerial.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Widyati (2021) tentang Pengaruh Komunikasi Organisasi, Remunisasi, Beban Kerja, Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pegawai dengan *Job Relevant Information* Sebagai Variabel Moderasi.

Pada penelitian yang dimodifikasi ini terdapat perbedaan variabel, pada penelitian ini menggunakan variabel independen komunikasi organisasi, partisipasi penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran, yang mana *job relevant information* menjadi variabel moderasi terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Subjek dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Determinan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan *Job Relevant Information* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sleman).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini determinan dari kinerja aparatur pemerintah daerah meliputi komunikasi organisasi, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan *job relevant information*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?
4. Apakah *job relevant information* memoderasi pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?
5. Apakah *job relevant information* memoderasi pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif komunikasi organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh positif kejelasan sasaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *job relevant information* memoderasi pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah *job relevant information* memoderasi pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi pada bidang akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan pemerintah daerah dan akuntansi manajemen pemerintah daerah terkait dengan kinerja aparatur pemerintah daerah pada organisasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi tambahan untuk penyusunan penelitian selanjutnya terkait topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini bisa sebagai ilmu baru tentang kinerja aparatur Pemerintah Daerah dibutuhkan adanya peran dan masyarakat, dan penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat mengawasi kinerja dari aparatur Pemerintah Daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerahnya pada pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya